

Kompromitas Atas Keterlibatan Wanita Dalam Aktivitas Berkesenian Di Minangkabau

Wardizal¹, Hendra Santosa²

Program Studi Seni Karawitan, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Denpasar

²*hendrasnts@gmail.com*

Artikel ini merupakan bagian dari hasil penelitian yang berjudul “Resistensi dan Kompromitas Terhadap Keterlibatan Wanita dalam Seni Pertunjukan di Minangkabau. Secara umum tulisan ini menguraikan tentang adanya praktik kompromi terhadap keterlibatan wanita dalam seni pertunjukan di Minangkabau. Kompromi sebagai salah satu usaha untuk meredam konflik secara kultural yang terjadi akibat keterlibatan wanita dalam seni pertunjukan tradisional Minangkabau. Pada masa sekarang telah terjadi proses demokratisasi proses berkesenian di tengah kehidupan sosio-kultural masyarakat Minangkabau. Penelitian ini dikonstruksikan berdasarkan metode kualitatif didasarkan pada filsafat rasionalisme. Filsafat Rasionalisme bukan karena mengingkari nilai pengalaman, melainkan pengalaman dipandang sebagai sejenis perangsang bagi pikiran. Penelitian rasionalisme mensyaratkan digunakannya pendekatan yang holistik yang menggunakan konstruksi pemaknaan atas realitas, tidak saja secara empirik sensual tetapi juga secara logis-teoritik dan etik. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan, seperti studi kepustakaan, untuk mendapatkan berbagai informasi dari sumber tertulis. Observasi dan wawancara, untuk mengamati berbagai fenomena dan peristiwa yang berkembang di tengah masyarakat. Kontribusi wanita terhadap perkembangan dan pelestarian kesenian tradisional Minangkabau, secara kualitatif telah melahirkan beberapa seniman yang melegenda di tengah masyarakat.

Kata kunci: Seni Pertunjukan, Minangkabau, Kompromitas, Konflik

This article is part of the results of a study entitled “Resistance and Compromise to the Involvement of Women in the Performing Arts in Minangkabau. This article generally describes the practice of compromising the involvement of women in performing arts in Minangkabau. Compromise is one of the efforts to reduce cultural conflicts that occur as a result of women’s involvement in traditional Minangkabau performing arts. At the present time there has been a process of democratization of the artistic process in the midst of the socio-cultural life of the Minangkabau people. This research was constructed based on qualitative methods based on the philosophy of rationalism. Rationalism philosophy is not due to denying the value of experience, but experience is seen as a kind of stimulus for the mind. Rationalism research requires the use of a holistic approach that uses construction of meaning for reality, not only sensually empirical but also logically-theoretical and ethical. Research data collection was conducted in several stages, such as literature study, to obtain various information from written sources. Observations and interviews, to observe various phenomena and events that develop in the community. The contribution of women to the development and preservation of traditional Minangkabau art has qualitatively produced several legendary artists in the community.

Keyword: Performing Arts, Minangkabau, compromise, conflict

Proses review: 2 - 30 september 2018, dinyatakan lolos 4 oktober 2018

PENDAHULUAN

Sosok wanita selalu menarik untuk diperbincangkan dan dikaji dalam berbagai perspektif. Disadari, bahwa wanita telah berkiprah dalam berbagai lini kehidupan masyarakat, baik untuk eksistensi dirinya, eksistensi keluarganya, maupun demi kesinambungan dari pada bangsa dan negara. Tidak sedikit dilihat bahwa wanita banyak yang menjadi pejuang dan pahlawan nasional baik dalam bidang pendidikan, politik, sosial, dan pemerintahan. Namun demikian, realitas yang berkembang di tengah masyarakat menunjukkan bahwa ambiguitas dan bias gender merupakan dua kata yang cukup tepat digunakan untuk menggambarkan situasi sosial kaum wanita dewasa ini. Pada satu sisi wanita dianggap sebagai sosok dan figur yang berjasa dalam membentuk watak dan karakter generasi penerus bangsa.

Keterlibatan wanita dalam aktifitas berkesenian di tengah kehidupan sosiokultural masyarakat Minangkabau, merupakan realitas yang sesungguhnya mengandung unsur paradoks. Pada satu sisi, kaum wanita Minangkabau adalah *bundo kandung*, yaitu sosok ibu sejati yang mempunyai sifat kepemimpinan, menjadi suri teladan, contoh dan panutan bagi keluarga, *nagari* dan kaum pesukuan. Dengan status yang demikian, setiap wanita Minangkabau diharapkan selalu berada dalam koridor budaya ideal, yaitu selalu berpayung kepada norma adat dan ajaran agama dalam bertindak dan berperilaku. Pada sisi lain, melibatkan diri dalam aktifitas berkesenian akan dihadapkan kepada adanya pandang miring dan negatif bagi sebagian anggota masyarakat tentang dunia berkesenian. Bagi masyarakat Minangkabau yang mayoritas beragama Islam, kesenian bukan bagian dari ajaran Islam, akan tetapi bagian dari upacara adat.

Konflik bagi masyarakat Minangkabau bukan merupakan sesuatu yang tabu. Hal ini dapat dilihat dari dinamika dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau. Perubahan tersebut disebabkan terjadinya konflik-konflik sosial dan kebudayaan misalnya, antar kelompok-kelompok sosial, kelompok sosial dengan individu, dan individu dengan individu lainnya. Dalam budaya Minangkabau, konflik adalah faktor penting dalam rangka perkembangan budaya. Dimensi konflik ini mencakup seluruh aspek sosial dan budaya mereka. Kebudayaan Minangkabau itu tersusun berdasarkan konflik-konflik sosial yang dapat dilihat pada (1) wilayah budaya (2) agama dan (3) struktur masyarakat. Namun demikian, keseluruhan konflik tersebut bermuara pada kepentingan bersama, yaitu membentuk Minangkabau secara utuh.

Konflik karena keterlibatan wanita dalam aktivitas berkesenian di Minangkabau juga tidak bisa dilepas-



Gambar 1. Talempong uwaik-uwaik (emak-emak) Dalam acara menyambut tamu Pada 2017

(Sumber: dokumentasi Maswir)

kan dari berbagai perubahan yang terjadi dalam struktur kekerabatan di Minangkabau. Perubahan yang dimaksud adalah melemahnya peranan keluarga luas dan menguatnya peranan keluarga. Tangung jawab rumah tangga lebih banyak ke atas pundak suami (ayah) dari pada *mamak*. Sebagai pengaruh rumah tangga modern, kedudukan *urang sumando* (suami) bukan lagi sebagai orang yang datang (tamu), akan tetapi sudah menjadi faktor penentu dimana keluarga batih dapat berdiri sendiri. Suami bertanggung jawab penuh mencari nafkah, sedangkan istri bertanggung jawab menyelenggarakan rumah tangga, mendidik dan membesarkan anak. Perubahan ini menyebabkan makin dekatnya anak kepada bapaknya dan makin kurangnya pengaruh *mamak* terhadap kemenakannya (Suwondo, 1978: 102).

Menguatnya peran ayah dalam struktur kekerabatan di Minangkabau merupakan tonggak sejarah dan angin pembaharuan dalam proses kehidupan kaum wanita, khususnya dalam aktivitas berkesenian. Pada masa dahulu keputusan *mamak* bagaikan 'titah' sang raja yang sulit dibantah dan harus dituruti. Oleh karena itu, pemicu konflik banyak mencuat kepemukaan dikarenakan sulitnya proses kompromi. Pada masa sekarang, dimana peran *mamak* sudah melemah, larangan atau resistensi terhadap keterlibatan wanita dalam aktivitas berkesenian sangat jarang terjadi. Kedekatan hubungan bathin antara seorang anak dengan bapak (ayah) tampaknya lebih banyak menghasilkan proses kompromi dari pada konflik. Realitas yang berkembang dewasa ini menunjukkan, kaum wanita di Minangkabau lebih bebas menentukan pilihan hidup, tanpa harus dihinggapi perasaan takut akan mendapat resistensi (perlawanan) dari ayahnya. Melibatkan diri dalam aktivitas berkesenian bagi kaum wanita bukan lagi dianggap sebagai perbuatan sumbang yang dapat memberi malu pada kaum kerabat pesukuan. Banyak kaum wanita di Minangkabau yang secara sadar menentukan pilihan hidupnya sebagai seniman, baik dilingkungan formal maupun non formal. Peran wanita dalam berbagai bentuk ekspresi berkesenian yang pada masa dahulu dimainkan oleh laki-laki yang di rias

menyerupai wanita, pada saat ini sudah diperankan secara langsung oleh kaum wanita. Hal ini menunjukkan proses keterbukaan yang terjadi dalam kehidupan sosiokultural masyarakat Minangkabau.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini pada hakekatnya merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu cara yang digunakan dalam rangka pengamatan berpartisipasi (*participant observation*). Data utama berupa data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan narasumber terpilih. Data pelengkap (sekunder) berupa data-data yang diperoleh melalui sumber-sumber tertulis, juga pengamatan langsung dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan struktur pertanyaan yang tidak ketat, pertanyaan terbuka dan semakin memfokus sehingga informasi yang diperoleh semakin lengkap dan mendalam. Analisis dilakukan berupa pengolahan dan analisis data, baik berupa data-data tertulis maupun data lisan. Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu suatu metode analisis untuk mendapatkan data dari kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Data yang berhasil dikumpulkan diorganisasikan menurut pokok dan sub masalahnya. Untuk menghasilkan data yang teruji, setiap sumber data (dari manapun datangnya) diseleksi dengan jalan membandingkan satu sama lain, sehingga terjadi fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penyeleksian dan hasil analisis data merupakan data-data yang akan digunakan untuk menulis laporan hasil penelitian (Wardizal, 2018: 64).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Perubahan Kebudayaan di Tengah Masyarakat Kebudayaan akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Perubahan kebudayaan tersebut setidaknya disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor lingkungan dan kontak dengan kebudayaan asing. Kemampuan berubah merupakan sifat yang penting dalam kebudayaan manusia (Haviland, 1988: 251). Kebudayaan haruslah dipandang sebagai sesuatu yang lebih dinamis, bukan sesuatu yang kaku atau statis. Adat istiadat pada hakekatnya adalah sebuah tradisi, dan tradisi tersebut bukanlah sesuatu yang tidak dapat diubah. Tradisi justru diperpadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia. Manusia-lah yang membuat sesuatu dengan tradisi; ia menerimanya, menolaknya atau mengubahnya (Peursen, 1984: 11).

Konflik merupakan fenomena yang secara kultural telah menjadi bagian dalam proses perkembangan kebudayaan Minangkabau. Hal ini diungkapkan dalam pepatah adat Minangkabau seperti bersilang kayu dalam tungku, disitu api makanya hidup. Maksudn-



Gambar 2. Talempong uwaik-uwaik (emak-emak) dalam acara *baralek* (pernikahan) pada 2001

(Sumber: Dokumentasi Maswir)

ya adalah, persilangan merupakan syarat mutlak untuk mencapai suatu konsensus yang diharapkan dari berbagai bentuk pertentangan. Dengan perkataan lain, dalam kehidupan masyarakat konflik niscaya dan bisa terjadi agar konsensus-konsensus sebagai wujud sintesis-sintesis ideal dapat dihasilkan. Konflik dan konsensus merupakan pencerminan kehidupan yang dinamik. Suatu tesis dikehendaki diiringi oleh antitesis-antitesis, sehingga ditemukan sintesis-sintesis.

Dalam perjalanan sejarahnya, berbagai bentuk konflik telah ikut mewarnai perkembangan kebudayaan Minangkabau. Adanya konflik-konflik tersebut diantaranya dapat dilihat dalam hubungannya dengan dua wilayah alam Minangkabau yaitu (1) *darek* (darat) dan *pasisia* (pesisir) atau rantau, (2) pada sistem pemerintahan yang disebut dengan sistem kelurahan. Salah satu tonggak sejarah dalam rangka perubahan kebudayaan Minangkabau adalah masuknya agama Islam ke Minangkabau. Ajaran-ajaran Islam moden dibawa ke Minangkabau oleh para haji serta para pelajar Indonesia dari Mekah (Hamka, 1967: 230). Semua orang Minangkabau menekankan pentingnya mengambil hukum Islam dari Al-Quran dan Sunah Nabi (Pelly, 1994: 34). Gerakan-gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh ulama-ulama Islam mendapat tantangan yang sangat keras dari kaum adat. Baik kaum adat maupun kaum ulama sama-sama berkepentingan mempertahankan kedudukan mereka dimuka pengikut mereka masing-masing. Pertentangan yang sangat tajam antara kaum adat dengan kaum agama mencapai puncaknya dengan meletusnya perang Paderi di Minangkabau (1803-1838). Konflik tersebut akhirnya dapat dinetralisir dengan ditanda tangannya perjanjian *Bukik Marapalam* pada tahun 1837 (Navis, 1984: 87). Diterimanya perjanjian Bukik Marapalam sebagai konsensus melahirkan falsafah, adat bersendi syarak (agama), syarak bersendi kitabullah (al-quran). Maksudnya, sumber dasar dari adat adalah hukum Islam, hukum Islam dasarnya al-quran (Navis, 1984: 33). Konsekwensi logis dari perjanjian Bukik Marapalam tersebut adalah, segala laku perbuatan orang Minangkabau harus dilandasi oleh aturan-aturan yang dibe-



Gambar 3. Pertunjukan Talempong Uwaik-Uwaik Pada Gelar Budaya Nusantara TMII 2012
(Sumber: Dokumentasi Maswir)

narkan oleh agama Islam dan posisi hukum adat harus menyesuaikan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.

Pembicaraan tentang kaum wanita di Minangkabau tidak bisa dilepaskan dari ajaran Islam. Dalam realitasnya, masyarakat Minangkabau adalah pemeluk agama Islam yang taat. Adalah sesuatu yang mengherankan, kalau ada masyarakat Minangkabau yang tidak beragama Islam. Mereka hanya percaya kepada Tuhan sebagaimana diajarkan agama Islam (Koentjaraningrat, 1982: 254). Falsafah adat bersendi syarak (agama), syarak bersendi kitabullah (Al-Quran). Maksudnya, sumber dasar dari adat adalah hukum Islam, hukum Islam dasarnya Al-Quran (Navis, 1984: 88). Rumusan ini jelas menegaskan supremasi Islam di atas adat dan inilah yang berlaku sampai sekarang. Dengan demikian, segala laku perbuatan orang Minangkabau harus dilandasi oleh aturan-aturan yang dibenarkan oleh agama Islam, dan posisi hukum adat harus menyesuaikan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Dalam praktek kehidupan bermasyarakat, ajaran-ajaran Islam juga memberikan rambu-rambu dan pembatasan-pembatasan terhadap kaum wanita. Situasi dan kondisi semacam ini, secara langsung maupun tidak langsung akan semakin “membelenggu” kaum wanita untuk melibatkan diri dalam aktivitas berkesenian (seni pertunjukan). Apalagi kebanyakan penyajian seni pertunjukan di Minangkabau dilaksanakan pada malam hari, jam 21.00 Wib sampai tengah malam bahkan sampai pagi menjelang subuh.

Ajaran agama Islam mewajibkan perpaduan antara keindahan dan kebaikan. Keindahan menimbulkan kesenangan, dan setiap kesenangan belum tentu bersifat baik. Begitu banyak hal-hal yang menimbulkan kesenangan, tapi mendatangkan kerusakan. Melihat aurat perempuan menyenangkan, tapi ia melahirkan pemikiran yang tidak bersih, mungkin juga tindakan

keji. Zina memberikan kenikmatan, tapi ia merusak individu dan sosial. Betapa banyak laku perbuatan yang menimbulkan kesenangan, tapi ia mendatangkan kerusakan. Kesenangan akan berbahaya, jika ia berdiri sendiri. Oleh karena itu, Islam memperpadukan kesenangan tersebut dengan kebaikan. Sifat baik akan mendatangkan keselamatan. Allah yang maha pengasih dan maha penyayang memberi petunjuk kepada manusia bagaimana membina keselamatan dan kesenangan, yang keduanya mencakup pengertian salam. Islam menggariskan syariat sebagai jalan untuk mencapai salam. Oleh karena itu, kesenangan pada umumnya dan kesenangan yang ditimbulkan oleh estetika khususnya mestilah bersifat baik. Kalau tidak bersifat baik, ditolak oleh Islam. Konsekwensinya, kesenian yang hanya berasaskan estetika saja, ditolak oleh Islam. Kalau indah tidak baik, tidak diakui oleh Islam. Dalam berkesenian, Islam memperimbangkan antara estetika dan etika, yaitu antara keindahan dan kebaikan. Mempertimbangkan faktor keindahan saja seperti falsafah “seni untuk seni” dengan tidak menghiraukan nilai baik dan buruknya, bermakna berlebih-lebihan dalam kesenian. Hal tersebut tidak disukai oleh Allah yang berarti tidak disukai oleh Islam.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa konsepsi kesenian Islam berazaskan perpaduan antara keindahan dan kebaikan atau perpaduan antara estetika dan etika. Keindahan menimbulkan rasa senang dan selama keindahan tersebut tidak mendatangkan mudarat, ia dibenarkan oleh Islam. Kesenangan yang tidak mendatangkan kerusakan adalah kesenangan yang baik, dan kesenangan yang baik adalah halal. Kesenian memberikan kesenangan, dan selama kesenangan tersebut tidak diharamkan, maka ia halal. Kalau ada kesenangan estetika menimbulkan kerusakan, maka karya yang mengandung kesenangan tersebut menjadi haram.

Dalam realitas masyarakat Minangkabau sekarang, kesenian boleh saja disajikan asal tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Berdirinya lembaga pendidikan kesenian seperti Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) Padang dan Akademi Seni Karawitan Indonesia (ASKI dan kini ISI) di Padang Panjang, menunjukkan bahwa kaum ulama dan masyarakat Minangkabau dalam konteks yang lebih luas bisa menerima kesenian.

Adat istiadat matrilineal (mengikuti garis keturunan ibu), akan tetap menempatkan suku bangsa Minangkabau sebagai suku bangsa yang cukup unik di Indonesia. Bahkan sifat kemasyarakatan soko ibu yang dipilih oleh nenek moyang orang Minang, kendatipun langka nyaris sempurna dan jarang tandangnya di dunia (Amir, 1999: 119). Sejalan dengan pe-



Gambar 4. *Randai* (Teater Tradisional Minangkabau) Dengan Keterlibatan Wanita dalam Pertunjukannya pada 2016

(Sumber: Dokumentasi Maswir)

rubahan dan perkembangan yang terjadi di tengah sosio kultural masyarakat Minangkabau, sejak tahun 1980 telah terjadi proses demokratisasi dalam aktivitas seni terutama yang melibatkan kaum wanita. Hal ini ditandai dengan mulai dibukanya peluang bagi semua kelompok dan golongan di masyarakat, baik pria maupun wanita untuk bersama-sama ikut berperan di dalam berbagai aktivitas seni pertunjukan. Kini kaum wanita di Minangkabau semakin berani dan secara terbuka menunjukkan kemampuannya di berbagai bidang seni pertunjukan. Dewasa ini, hampir semua genre seni pertunjukan yang semula didominasi oleh kaum pria, mulai dibuka bagi kaum wanita. Perubahan seperti ini suatu pertanda bahwa telah terjadi berbagai pergeseran dikalangan masyarakat Minangkabau dalam hal memperlakukan kaum wanita dalam aktivitas berkesenian.

Berdirinya Lembaga Pendidikan Tinggi Kesenian ISI Padang Panjang

Secara historis, hadirnya Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang sebagai satu-satunya perguruan tinggi seni di luar Jawa dan Bali, merupakan realisasi dari perkembangan Akademi Seni Karawitan Indonesia (ASKI), Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) dan Konservatori Karawitan (KOKAR). Berdirinya KOKAR sesuai menurut Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan tanggal 7 Juli 1965 No. 84/1965 tentang berdirinya Konservatori Karawitan jurusan Minangkabau di Padang Panjang, yang terdiri dari dua program studi, yaitu: (1) program studi KOKAR A, menerima siswa tamatan SMP yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga kesenian tingkat dasar, dan (2) program studi KOKAR B, menerima siswa tamatan SMA guna untuk menghasilkan tenaga kesenian yang terampil dalam taraf yang lebih mahir. Kemudian pada tanggal 22 Desember 1965, terbitlah Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan tentang peningkatan status KOKAR B menjadi Akademi

Seni Karawitan Indonesia (ASKI) jurusan Minangkabau di Padang Panjang. Pada awalnya, Keberadaan ASKI Padang Panjang ini merupakan filial dari ASKI Surakarta yang pada waktu itu sebagian tenaga pengajarnya didatangkan dari IKIP Padang dan ASKI Surakarta. Pada periode awal berdirinya, kehadiran lembaga pendidikan tinggi kesenian ASKI (kini ISI) di Padang Panjang, sesungguhnya bermakna ganda dan sesuatu yang paradoks. Pada satu sisi, keberadaan lembaga pendidikan kesenian tersebut diposisikan sebagai pusat penggalian, pembinaan, pelestarian dan pengembangan seni budaya Minangkabau, dengan menghasilkan lulusan yang terampil dan profesional di bidang kesenian. Pada sisi lain, lingkungan etik kultural masyarakat Padang Panjang adalah cerminan dari suatu masyarakat dengan nilai-nilai religiusitas yang sangat tinggi. Padang Panjang adalah sebuah daerah yang semenjak dahulu dijuluki sebagai kota Serambi Mekah. Di Daerah ini berdiri dua buah lembaga pendidikan menengah yang memusatkan pendidikan dan pengajarannya pada Agama (Islam), yaitu Diniyah Putri yang mengkhususkan siswanya pada remaja putri dan Thawalib untuk siswa putra. ASKI (ISI) Padang Panjang adalah suatu tempat untuk berolah dan berkreativitas seni yang diidentikkan dengan budaya sekuler (keduniawian), sedangkan Diniyah Putri dan Thawalib adalah tempat untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai spiritual dan religiusitas. Realitas yang paradoks tersebut akan berimplikasi secara langsung maupun tidak langsung, khususnya terhadap eksistensi ASKI/STSI/ISI Padang Panjang maupun lingkungan sosio kultural masyarakat.

Dalam realitasnya sekarang tampaknya telah terjadi keterbukaan dan demokratisasi dalam proses berkesenian dan rasa keberterimaan masyarakat terhadap keberadaan kampus ASKI/STSI/ISI Padang Panjang. Presentasi dari estetika dan etika berkesenian, sudah menjadi bagian dari kebutuhan sosio kultural masyarakat terutama dalam kaitannya dengan upacara adat. Jumlah siswa yang melanjutkan studinya ke ASKI/STSI/ISI Padang panjang (termasuk didalamnya wanita) cukup mengembirakan, walaupun secara kuantitatif mengalami fluktuatif.

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Di samping struktur kekerabatan yang berubah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dipungkiri ikut mewarnai perubahan kebudayaan yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau. Sebagaimana diyakini banyak orang, teknologi dan budaya merupakan dua hal yang saling mengkait, bahkan terdapat hubungan yang timbal balik. Kemajuan pemikiran manusia dalam bentuk kemajuan kebudayaan mendorong majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebaliknya kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi pemacu kemajuan kebudayaan. Bagaimanapun juga, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi cepat atau lambat

akan mempengaruhi kaidah-kaidah kebudayaan, lembaga-lembaga sosial budaya dan (dari segi sosial politik) pola-pola pengambilan keputusan kebijakan pemerintah (Sudarsono, 1992: 4).

Sekarang ini, luas dan kecepatan penemuan baru di bidang teknologi (termasuk teknologi informasi) telah sedmikian cepatnya, dan merupakan sesuatu yang tidak dapat dibendung dan ditolak. Oleh karena itu, masyarakat dengan kebudayaannya harus bisa mencermati dan mempersiapkan diri menghadapi fenomena tersebut. Kesiapan itu bukan hanya dalam aspek ekonomi dan keuangan, tetapi juga kesiapan mental dan budaya. Pengalaman sesama ini menunjukkan, bahwa penerapan dan perkembangan teknologi selalu akan membawa perubahan pola hidup, cara berfikir dan dengan sendirinya juga juga budaya manusia. Realitas yang ada menunjukkan, betapa kehadiran radio dan kemudian televisi telah mengubah pola pikir, gaya hidup dan budaya masyarakat. Betapa perubahan semua itu telah menimbulkan konflik-konflik baik dalam individu maupun dalam masyarakat. Ada kelompok yang mudah berubah, meskipun sebenarnya mereka belum siap. Ada yang cenderung menolak dan ingin bertahan meskipun untuk mempertahankan pendiriannya, mereka juga mempergunakan teknologi yang dipakainya. Bagi banyak negara berkembang (seperti Indonesia) masalah ini memang dilematis. Disatu sisi pemanfaatan teknologi baru merupakan bagian dari pembangunan menuju kemajuan. Disisi lain, teknologi baru selalu dianggap sebagai perusak budaya bangsa. Kehadiran televisi telah mengubah perilaku, pola hidup dan komunikasi dalam keluarga. Banyak waktu yang kemudian dihabiskan untuk duduk di depan televisi, sehingga waktu yang tersedia untuk berkomunikasi diantara sesama anggota keluarga akan berkurang. Juga mungkin tidak banyak yang menyadari bahwa kehadiran iklan di media masa terutama televisi, telah memicu liberalisasi dan demokratisasi dalam keluarga. Iklan mengajari orang untuk memilih segala hal yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Internalisasi dari pola pikir yang demikian selanjutnya akan diterapkan juga dalam kehidupan lainnya, termasuk dalam memenuhi kebutuhan akan seni atau keindahan. Maka tumbuhlah budaya `saga berhak menentukan pilihan untuk diri saya". Telekomunikasi juga telah mengubah pola hubungan diantara manusia. Orang tidak perlu bertatap muka untuk dapat berkomunikasi antar mereka. Disinipun muncul elemen yang secara berangsur akan mengikis budaya feodal dan budaya paternalisme.

Wacana globalisasi sebagai sebuah proses ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga is mampu mengubah dunia secara mendasar. Komunikasi dan transportasi

internasional telah menghilangkan batas-batas budaya setiap bangsa. Kebudayaan setiap bangsa yang semula terbatas pada wilayah sendiri, kini cenderung mengarah pada ideologi baru yang bernama globalisasi yang melibatkan umat manusia secara menyeluruh (Soebadio dalam Said, 2000:151). Salah satu gejala yang paling menonjol sebagai dampak dari globalisasi adalah terjadinya perubahan budaya dalam masyarakat tradisional, yakni perubahan dari masyarakat tertutup menjadi masyarakat yang lebih terbuka; dari nilai-nilai yang bersifat homogen menuju pluralisme nilai dan norms sosial (Said, 2000: 151-152).

Dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan, seperti halnya yang sedang dialami masyarakat Minangkabau dewasa ini, selalu terjadi dualisme antara keinginan untuk tetap mempertahankan nilai-nilai lama yang bertalian dengan identitas diri atau mempertahankan budaya tradisi, sedangkan pada pihak lain ingin menerima modernisasi sebagai tuntutan zaman akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kondisi masyarakat Minangkabau yang sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat pasca agraris atau sering juga dikatakan dikotomi dari masyarakat tradisional ke masyarakat yang lebih maju atau modern, terjadi perubahan sosial yang sangat kompleks, menyangkut perubahan segala aktivitas manusia dari masa lampau sampai ke masa sekarang, termasuk juga perubahan pengertian dan kesadaran perilaku (Garne, 1977: 3). Dalam mengamati perubahan sosial tersebut, Talcott Parson seorang sosiolog asal Amerika melalui pendekatannya yang terkenal yaitu *structural Functional/Approach*, mengatakan bahwa pada dasarnya perubahan-perubahan sosial itu timbul atau terjadi melalui tiga macam kemungkinan. Pertama, penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh sistem sosial tersebut terhadap perubahan-perubahan yang datang dari luar. Kedua, pertumbuhan melalui proses diferensiasi struktural dan fungsional, dan Ketiga, penemuan-penemuan baru oleh anggota-anggota masyarakat (Nasikun, 1974; 17).

Perkembangan Industri Pariwisata

Fenomena lain yang muncul dizaman global ini adalah berkembang pesatnya industri pariwisata. Menurut World Travel and Tourism Council (1992), industri pariwisata telah menghasilkan *gross out put* 3,5 trilyun USD atau lebih dari 12 persen dari seluruh pengeluaran konsumen. Pariwisata dan travel juga memasok hampir 130 juta lapangan pekerjaan atau menyerap 7 persen dari seluruh tenaga kerja. Oleh karena itu, kepariwisataan merupakan *leading industrie contributor* terhadap GNP, yakni lebih dari 6 % dengan investasi melebihi 422 milyar USD. Kontribusi pariwisata dan travel tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung atau melalui pajak perseorangan, secara

kuantitatif mencapai 400 milyar USD setiap tahun (Theobald dalam Hasanudin, 1994:3-4).

Pertumbuhan industri pariwisata begitu spektakuler, pada tahun 1992 tercatat 476 juta kunjungan wisatawan internasional ke berbagai negara di dunia. Hal itu menunjukkan tingkat pertumbuhan 4.6 % dengan total penerimaan devisa 279 milyar USD. Pada tahun berikutnya (1993) arus kunjungan wisatawan Internasional mencapai 0.5 milyar dengan tingkat pertumbuhan 5.04 % dan total penerimaan devisa 304 milyar USD. Apabila diasumsikan bahwa rata-rata pertumbuhan kepariwisataan Internasional 3-4,5 %. Sekretariat Jenderal WTO (*World Tourism Organisation*) memprediksikan kedatangan wisatawan pada tahun 2000 tidak kurang dari 650 juta orang (WTO dalam Hasanudin, 1992:2).

Perkembangan yang begitu pesat dalam dunia kepariwisataan memaksa masyarakat dunia dan kebudayaan *go internasional*, serta mengharuskan masyarakat mau tidak mau harus menjadi warga dunia yang multi budaya dan menjadi *tourist societies* (Pitana, 1999: 5). Dalam konteks ini, masing-masing negara di dunia sekarang ini berlomba dan bersaing untuk menciptakan daerah kunjungan wisatawan (*tourist destination*) dan produk unggulan. Industri pariwisata diyakini mampu memberikan sumbangan terbesar bagi penerimaan devisa negara. Walaupun industri pariwisata membawa dampak negatif dan menimbulkan berbagai tipe konsekuensi terhadap lingkungan dan sosio-kultural, dalam perspektif ekonomis pariwisata (internasional atau domestik) adalah industri yang sangat potensial sebagai penghasil devisa dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, dan memberdayakan serta meningkatkan taraf perekonomian masyarakat daerah tujuan wisata setempat.

Tuntutan Kesetaraan Gender

Berbicara tentang gender berarti berbicara tentang laki-laki dan perempuan terutama dalam konteks sifat, pembagian kerja dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial budaya (Arjani, 2008: 131). Secara historis, isu tentang gender telah mengalami beberapa fase sejarah bahkan sudah muncul semenjak nabi Adam dan Hawa dimuka bumi ini. Hanya saja, pada jaman masyarakat liar (*savagery*) dan masyarakat barbar (*barbarism*), belum ada perhatian bahkan yang mempersoalkan tentang gender sebagai suatu permasalahan yang penting untuk dibahas. Hal ini disebabkan pada jaman itu belum muncul sistem kekuasaan atas saia satu jenis kelamin, sehingga masyarakat menilai pembagian kerja seksual yang telah dibentuknya merupakan sesuatu yang wajar dan sah-sah saja. Pada jaman masyarakat beradab (*civilized society*), pengumpulan kekayaan mulai dilakukan, kekuasaan atas orang lain dan pembentukan akan

milik pribadi pun mulai tumbuh serta ideologi patriarki mulai muncul dan berkembang. Ideologi patriarki merupakan ideologi yang menempatkan laki-laki/bapak (*patriarch*) pada posisi yang superior sebagai pemegang kekuasaan dan pengambil keputusan yang utama (Arjani, 2008: 131).

Ideologi patriarki ini kemudian tersosialisasikan dari generasi ke generasi melalui pendidikan, baik di dalam keluarga maupun masyarakat sehingga mengakar dan mempengaruhi cara berpikir, cara pandang, pola bersikap dan berperilaku semua individu di masyarakat. Oleh karena itu, pada budaya patriarki ini kekuasaan laki-laki atas perempuan tidak saja terjadi dalam kehidupan keluarga, tetapi juga dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas. Pada intinya budaya patriarki ini menekankan pada pengutamaan laki-laki dalam banyak hal. Misalnya sebagaimana dikutip Arjani mengatakan, bahwa budaya patriarki mengkondisikan perempuan harus tunduk kepada laki-laki, baik dilingkungan keluarganya maupun dilingkungan komunitasnya. Situasi ini menyebabkan perempuan tidak mempunyai otoritas dalam berbagai hal, baik yang menyangkut kehidupan keluarganya maupun kehidupan pribadinya. Ketidakadilan gender ini termanifestasi dalam berbagai bentuk perlakuan seperti: subordinasi, marginalisasi, diskriminasi dan pemiskinan bagi perempuan (Arjani, 2008: 132).

Tuntutan kesetaraan gender tampaknya ikut jadi pemicu dan pemacu keterlibatan kaum wanita dalam aktivitas berkesenian di Minangkabau. Secara mendasar dan anggapan yang berkembang luas di tengah masyarakat, terjadinya perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan lebih didasarkan kepada faktor psikologis. Fenomena ini secara fungsional sengaja dikembangkan oleh para penganut teori *nature* dimana perbedaan antara laki-laki dan perempuan, baik secara sosial budaya maupun biologis adalah kodrat dan harus diterima. Atas dasar pemikiran yang demikian, mereka yang sepeham dengan aliran ini akan sulit menerima upaya perubahan kondisi sosial budaya yang sudah mereka terima sejak lahir, karena hal ini dianggap sebagai pemberian Tuhan yang tidak perlu diganggu gugat. Para pengikut dan penganut teori *nature* beranggapan bahwa perbedaan psikologis antara laki-laki dan perempuan, pada hakekatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya. Konstruksi ini telah menempatkan perempuan dan laki-laki pada perbedaan kelas, dimana laki-laki diidentikan dengan kelas *bourgeois* dengan posisi superior dan perempuan sebagai kelas *proletar* dengan posisi inferior. Terkait dengan pembagian peran gender, konstruksi budaya menempatkan perempuan pada ranah domestik, sementara laki-laki pada ranah publik (Arjani, 2008: 133). Norma dan peran Gender yang pada hakikatnya merupakan 'kepantasan' bagi laki-laki dan perempuan bukanlah

bawaan sejak lahir (kodrat), melainkan berupa bentuk masyarakat atau konstruksi sosial.

Proses rekonstruksi sosial tentang perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan yang berdampak pada diskriminasi dan marginalisasi kehidupan kaum perempuan telah melahirkan gerakan-gerakan feminisme. Feminisme pada dasarnya adalah suatu gerakan wanita yang bertujuan untuk menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum pria dengan kaum wanita di masyarakat. Dengan kata lain feminisme adalah gerakan wanita yang menolak setiap perbedaan antar manusia yang dibuat atas dasar perbedaan jenis kelamin (Wiratini, 2006: 16-17). Dalam perkembangannya kemudian telah melahirkan gerakangerakan post-feminisme yang menempatkan laki-laki dan wanita pada derajat yang sama. Perbedaannya hanya terletak pada sesuatu yang bersifat kodrati, dimana kaum wanita melahirkan dan menyusui, sedangkan kaum laki-laki tidak. Pola pikir dan Cara pandang baru tersebut telah melahirkan bentuk-bentuk tindakan dan perilaku dikalangan kaum wanita yang sebelumnya mungkin dianggap tabu.

SIMPULAN

Peristiwa masa lampau yang terkait erat dengan dunia berkesenian telah melahirkan resistensi terhadap wanita dalam berkesenian. Resistensi ini terjadi juga pada masyarakat yang lain dalam berbagai hal bahkan tidak mengindahkan ajaran adat dan agama dan melahirkan golongan masyarakat *parewa* atau golongan yang selalu memakai pakaian hitam atau memakai destar di kepalanya, gemar berjudi dan menyambung ayam. Trauma sejarah terkait fungsi kesenian dimasa lalu ikut menjadi pemicu antipati masyarakat terhadap dunia berkesenian secara umum. Beberapa bentuk seni pertunjukan rakyat tradisional sangat erat kaitannya dengan dunia mistik, magis dan difungsikan untuk hal-hal negatif.

Adat Minangkabau kurang memberikan peluang bagi kaum wanita untuk terlibat dalam aktifitas berkesenian. Resistensi terutama datang dari pihak *mamak* (saudara ibu yang laki-laki). Melibatkan diri dalam beraktifitas kesenian bagi wanita di Minangkabau dianggap sebagai perbuatan sumbang dan perilaku menyimpang yang memberi malu pada kaum kerabat pesukuan. Secara struktural mengharuskan pihak *mamak* meresistensi keponakannya karena sistem kekerabatan matrilineal yang berkuasa adalah *mamak*, dan hal ini tentunya berlaku pula dalam keterlibatan ponakan wanita dalam berkesenian.

Proses kompromitas atas keterlibatan kaum wanita dalam aktifitas berkesenian di Minangkabau disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor utama yang

berinflikasi sangat luas adalah terjadinya perubahan dalam struktur kekerabatan di Minangkabau. Perubahan yang dimaksud adalah melemahnya peranan keluarga luas (*extended family*) dan menguatnya peranan keluarga *batih* (*nucleus family*). Perubahan ini mendekatkan peran ayah pada anak perempuannya dibanding dengan *mamak* (saudara laki-laki dari ibu). Hal ini dimungkinkan karena keluarga *batih* dapat berdiri sendiri. Maka dengan demikian dimana secara struktural resistensi terhadap keterlibatan wanita dalam seni pertunjukan tradisional Minangkabau dapat dilakukan oleh seorang *mamak*, selanjutnya karena memudarnya peran *mamak* dan digantikan oleh peran ayah, melahirkan proses kompromi untuk menghindari konflik karena hubungan batin antara anak dan ayah. Saat ini banyak kaum wanita yang secara sadar menentukan pilihan hidupnya sebagai seniman.

DAFTAR RUJUKAN

- Amir, MS. 1999. *Adat Minangkabau: Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Jaya.
- Arjani, Ni Luh. 2008. "Gender Dalam Pendidikan Ditinjau Dari Perspektif Budaya." In *Kumpulan Makalah Kongres Kebudayaan Bali 14-16 Juni 2008*, Denpasar: Panitia Pelaksana Kongres Kebudayaan Bali I.
- Garne, Roberta Ash. 1977. *Social Change*. Chicago: Rand Mc. Nally Collage Publishing Company.
- Hamka. 1967. *Haji Abdul Malik Karim Amarullah, Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amarullah Dan Perjuangan Kaum Agama Di Sumatera*. Jakarta: Djayamurni.
- Haviland, William A. 1988. *Antropologi Jilid II*. Terjemahan. Jakarta: Erlangga.
- Koentjaraningrat. 1982. *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*. Jakarta: Jambatan.
- Nasikun. 1974. *Sebuah Pendekatan Untuk Mempejalari Sistem Sosial Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Sosial Politik UGM.
- Navis, Ali Akbar. 1984. *Alam Berkembang Jadi Guru*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pelly, Usman. 1994. *Urbanisasi Dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Minangkabau Dan Mandailing*. Jakarta: PT Pustaka.

Peursen, CA Van. 1984. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.

Pitana, I Gede. 1999. *Internasiomalisasi Dan Tradisionalisasi Pariwisata Dan Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Bali*. Denpasar.

Said, Nur. 2000. "Pasang Surut Beberapa Kesenian Jawa Tradisional Dalam Perspektif Globalisasi." *MUDRA Jurnal Seni Budaya* VIII(9).

Sudarsono, Juwono. 1992. *Ilmu, Teknologi Dan Etika Berprofesi: Pandangan Sosial Politik Dalam Masyarakat (Jurnal Sosiolog)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Suwondo, Bambang. 1978. *Adat Perkawinan Daerah Sumatera Barat*. Jakarta: Depdikbud: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.

Wardizal, Hendra Santosa; 2018. "Peran Wanita Dalam Seni Pertunjukan Tradisional Minangkabau Di Tengah Perubahan Kehidupan Sosio Kultural Masyarakatnya." *Kalangwan* 4(1): 63–70. <http://jurnal.isi-dps.ac.id/index.php/kalangwan/article/view/338/236>.

Wiratini, Ni Made. 2006. "Peranan Wanita Dalam Seni Pertunjukan Bali Di Kota Denpasar: Perspektif Kajian Budaya." Universitas Udayana Denpasar.